SKRIPSI

KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SEKADAU

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Yupita
E1032201020

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2025

SKRIPSI

KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SEKADAU

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Yupita
E1032201020

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SEKADAU

Disusun Oleh:

Yupita

E1032201020

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Drs. H. Agus Eka, M.Si
NIP.196301231988101001

Tanggal : 24-02-25

Dosen Pembimbing Pendamping

Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si
NIP.19830627006042020

Tanggal : 17-02-25

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

HALAMAN PENGESAHAN

KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SEKADAU

Oleh:

Yupita

E1032201020

Dipertahankan di : Pontianak
Pada hari/tanggal : Jum'at 14 Maret 2025
Waktu : 09:00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Seminar & Sidang Fisip Untan

Tim Penguji

Ketua

Drs. H. Agus Eka, M.Si
NIP.196301231988101001

Sekretaris

Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si
NIP.19830627006042020

Penguji Utama

Dr. Yulius Yohanes, M.Si
NIP.196405271992021001

Penguji Pendamping

Rasidar. SE.M.Si
NIP.196808252007012001

Disahkan Oleh :
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Yupita (E1032201020). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Sekadau. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sekadau. Permasalahan ini terkait bagaimana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sekadau. Penelitian ini menggunakan teori Kinerja menurut Dwiyanto (2006:50), untuk mengukur kinerja dapat menggunakan indikator sebagai berikut : Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini Kinerja BPBD Kabupaten Sekadau mengacu pada RPJMD, dengan target peningkatan indeks kapasitas daerah menjadi 0,67% dan waktu respons tanggap 23 menit pada tahun 2026 mendatang. Pelayanan informasi, pencegahan, dan evakuasi bencana terus meningkat, dengan target cakupan 100% layanan pada 2026. Rekapitulasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi signifikan, namun angka kasus berhasil ditekan dari 41 kasus pada 2020 menjadi 11 kasus pada 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan BPBD dalam sosialisasi, pelatihan, dan koordinasi dengan TNI, Polri, serta masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi pemantauan hotspot melalui satelit penginderaan jauh memungkinkan BPBD mendeteksi titik kebakaran dengan akurat, sehingga respons cepat dapat dilakukan, mendukung mitigasi karhutla dan pelayanan masyarakat secara optimal. Saran untuk penelitian ini BPBD disarankan untuk meningkatkan kinerja melalui optimalisasi sumber daya, percepatan respons di wilayah terpencil, dan penguatan sosialisasi serta pelatihan masyarakat. Kolaborasi dengan instansi terkait, transparansi anggaran, dan pemanfaatan teknologi juga perlu ditingkatkan untuk efektivitas program.

Kata Kunci : ***Kinerja, Menanggulangi, Kebakaran Hutan dan Lahan***

ABSTRACT

Yupita (E1032201020). The Performance of the Regional Disaster Management Agency in Coping Forest and Land Fires in Sekadau Regency. Undergraduate Thesis. Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tanjungpura. 2025.

This study aims to describe and analyze the performance of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Sekadau Regency in coping forest and land fires (known as *Karhutla*) in the region. The research problem focuses on evaluating how effectively BPBD Sekadau carries out its duties in mitigating forest and land fire incidents. The study employs Dwiyanto's (2006:50) performance theory, which uses the following indicators: productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings showed that the performance of BPBD Sekadau was guided by the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD), targeting an increase in regional capacity index to 0.67% and an emergency response time of 23 minutes by 2026. Efforts in disaster information services, prevention, and evacuation have shown improvement, with a goal of achieving 100% service coverage by 2026. The record of forest and land fire cases from 2020 to 2024 indicated significant fluctuation; however, the number of incidents has decreased from 41 cases in 2020 to 11 cases in 2024. This decline demonstrated the agency's success in conducting public outreach, training, and coordination with the military (TNI), police (Polri), and local communities. Additionally, the utilization of satellite-based remote sensing technology for hotspot monitoring has enabled accurate detection and rapid response, thereby supporting effective fire mitigation and public service delivery. This study suggests that BPBD improve its performance by optimizing resources, accelerating response in remote areas, and strengthening community education and training programs. Enhanced collaboration with relevant agencies, budget transparency, and technological advancements are also necessary to increase program effectiveness.

Keywords: Performance, Coping, Forest and Land Fires

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul : “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Sekadau”. Judul ini dipilih peneliti sebagai penelitian berdasarkan permasalahan yang ada atas dikarenakan Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi memberikan banyak dampak yang merugikan bagi masyarakat Kabupaten sekadau serta daerah sekitarnya. Dampak tersebut berupa adanya kabut asap yang berbahaya bagi Kesehatan dan menghambat aktivitas masyarakat dan dampak ini berlangsung setiap tahunnya di musim kemarau. Tujuan penelitian ini untuk mendesrkipsikan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sekadau. Permasalahan ini terkait bagaimana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sekadau.

Terdapat beberapa permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau menghadapi beberapa permasalahan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seperti kurangnya sosialisasi dan edukasi yang efektif, terutama di wilayah terpencil yang sulit diakses, sehingga kesadaran masyarakat terhadap pencegahan karhutla masih rendah. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti peralatan pemadam dan kendaraan yang mampu menjangkau daerah terpencil, menjadi kendala utama dalam respons tanggap darurat. Tantangan medan di wilayah terpencil juga

memperlambat penanganan kebakaran. Di sisi lain, pelibatan masyarakat lokal melalui kelompok relawan atau Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) masih minim, sehingga potensi dukungan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan karhutla hal tersebut membuat belum sepenuhnya pembakaran lahan benar – benar tidak ada sama sekali di wilayah Kabupaten Sekadau. Hal ini menyebabkan praktik pembakaran lahan belum sepenuhnya dapat dihilangkan di wilayah Kabupaten Sekadau.

Berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan pada masalah - masalah tersebut peneliti menggunakan teori kinerja menurut Dwiyanto (2006: 50), dengan indikator Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu peneliti menganalisis data dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan melakukan penarikan kesimpulan. Untuk memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian yang dilaksanakan, berdasarkan teori Kinerja menurut (Dwiyanto 2006, 50), bahwa indikator Produktivitas, BPBD Sekadau berhasil menekan karhutla melalui respons cepat, koordinasi, dan sosialisasi. Dengan tenaga terlatih, peralatan, dan anggaran memadai, BPBD tetap berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjaga lingkungan. Kualitas layanan, BPBD Sekadau dalam menanggulangi karhutla sangat baik, dengan respons cepat, koordinasi

efektif, dan tim terlatih. Meski akses ke daerah terpencil menjadi tantangan, BPBD terus meningkatkan edukasi dan kualitas layanannya. Responsivitas, BPBD Sekadau dalam menangani karhutla sangat tinggi, dengan respons 15-30 menit di wilayah mudah dijangkau melalui Tim Reaksi Cepat. Namun, medan sulit di daerah terpencil memperlambat penanganan, sehingga peningkatan fasilitas dan koordinasi instansi terkait sangat diperlukan. Responsibilitas, BPBD Sekadau dalam menangani karhutla sangat tinggi, dengan laporan anggaran transparan, pengelolaan dana akuntabel, serta evaluasi berkala. BPBD berkoordinasi dengan instansi terkait dan melibatkan masyarakat melalui pelatihan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk memastikan penanggulangan karhutla yang efektif dan Akuntabilitas, BPBD Kabupaten Sekadau dalam menangani karhutla tercermin melalui transparansi pelaporan, evaluasi rutin, dan koordinasi dengan instansi terkait. Edukasi masyarakat dinilai memadai, namun perlu peningkatan akses informasi ke wilayah terpencil untuk partisipasi lebih luas.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dan masalah yang ditemukan di lapangan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membangun dan dijadikan masukan ataupun peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan disarankan meningkatkan produktivitas melalui sosialisasi dan edukasipencegahan karhutla yang melibatkan tokoh masyarakat, kelompok tani, dan komunitas lokal, serta mengoptimalkan sumber daya. Kualitas layanan dapat diperkuat dengan menyediakan sarana tambahan seperti kendaraan pemadam untuk wilayah terpencil dan pelatihan rutin bagi tim

BPBD. Responsivitas perlu ditingkatkan melalui posko strategis, teknologi real-time seperti drone, serta pelatihan masyarakat sebagai tim tanggap darurat. BPBD juga disarankan menjaga responsibilitas dengan transparansi anggaran dan memperluas edukasi melalui media digital untuk meningkatkan akuntabilitas.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	:	Yupita
Nomor Mahasiswa	:	E1032201020
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah hasil karya asli saya sendiri, bukan hasil karya orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di program studi, fakultas, atau perguruan tinggi lain. Selama pengetahuan saya, skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara jelas dirujuk dalam Daftar Pustaka di skripsi ini.

Pontianak, 30 Januari 2025
Saya membuat pernyataan



Yupita
E1032201020

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedih lah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia".

(Basakara Putra)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orangtua tercinta Bapak **Bahtiar** dan Ibu **Robani**, yang selalu menjadi motivasi dan semangat penulis. Doa, kasih sayang dan pengorbanan kalian adalah alasan terbesar penulis bisa sampai di titik ini. Terimakasih atas segala dukungan, semagat, dan cinta yang tiada henti mengalir dalam setiap Langkah penulis.
2. Saudariku satu-satunya. Yaitu adik saya **Selpina** yang selalu memberikan kebahagiaan dan semangat dalam hidup penulis. Terimakasih atas dukungan, canda tawa, dan kebersamaan yang menjadi penyemangat di setiap Langkah penulis. Semoga keberhasilan penulis bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagimu untuk meraih impianmu di masa depan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sekadau" dengan baik dan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya, peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dari skripsi ini baik dari segi materi maupun teknik penyajian, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan. Peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Herlan. S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Drs. H. Agus Eka, M.Si selaku Pembimbing Utama dan Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Pendamping serta sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia memberikan kemudahan dan arahan, motivasi dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini, baik secara metodologi penelitian serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan Usulan Penelitian ini.

3. Dr. Yulius Yohanes, M.Si sebagai Penguji Utama dan Rasidar. SE.M.Si selaku Penguji Pendamping yang telah bersedia memberikan saran dan masukan agar penulisan skripsi ini memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
4. Dr. Ira Patriani, S.I.P, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
5. Bima Sujendra, S.I.P, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Wakil dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan dukungan selama perkuliahan berlangsung.
7. Kepada Badan Penangguangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau, Kepala Bagian Oprasional Polisi Resor Kabupaten Sekadau, Kasi Pemadam Kebakaran dan Evakuasi Pemadam Kebakaran Kabupaten Sekadau, Kepala Desa Mungguk Kabupaten Sekadau yang telah bersedia memberikan informasi terkait penelitian ini.
8. Teman-teman dan para sahabat Terimakasih telah menjadi rekan terbaik disaat duka maupun duka. Terimakasih atas banyaknya kontribusi yang membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Yang selalu ada pendengar yang baik, senantiasa memberikan semangat, dukungan, saran dan motovasi yang selalu menguatkan satu sama lain.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dan dorongan yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan dari Allah SWT, demikian juga skripsi ini

walaupun sudah penulis susun secara maksimal, namun tentunya masih ada kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Pontianak, 30 Januari 2025
Penulis

Yupita
E1032201020

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN.....

HALAMAN PENGESAHAN.....

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

RINGKASAN SKRIPSI iv

PERNYATAAN KEASLIAN.....vii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... viii

KATA PENGANTAR.....ix

DAFTAR ISI.....xii

DAFTAR TABEL.....xiv

DAFTAR GAMBAR.....xv

DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN.....1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah Penelitian.....12
1.3. Fokus Penelitian.....12
1.4. Rumusan Masalah.....12
1.5. Tujuan Penelitian 13
1.6. Manfaat Penelitian 13
1.6.1. Manfaat Teoritis.....13
1.6.2. Manfaat Praktis 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....15
2.1. Konsep Kinerja.....15
2.2. Indikator Kinerja Organisasi.....16
2.3. Penilaian Kinerja.....20
2.4. Hasil Penelitian Yang Relevan.....21
2.5. Alur Pikir Penelitian.....25
2.6. Pertanyaan Penelitian.....29

BAB III METODE PENELITIAN 30
3.1. Jenis Penelitian.....30
3.2. Langkah – Langkah Penelitian.....30
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 31
3.3.1. Lokasi Penelitian.....31
3.3.2. Waktu Penelitian.....32
3.4. Subjek dan Objek Penelitian.....33
3.4.1. Subjek Penelitian.....33
3.4.2. Objek Penelitian.....34
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....34
3.6. Instrument atau Alat Pengumpulan Data 36
3.7. Analisis Data 36
3.7.1. Teknik Analisis Data.....36
3.7.2. Teknik Kebsahan Data.....38

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 40
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Sekadau.....40
4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Sekadau.....40
4.1.2. Letak Geografis 40
4.2. Demografis.....41
4.3. Keadaan Sosial dan Ekonomi.....43
4.3.1. Keadaan Sosial.....43
4.3.2. Keadaan Ekonomi.....44
4.4. Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau.....45
4.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi 47
4.4.2. Ketenagakerjaan.....56

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58
5.1. Deskripsi Hasil Penelitian.....58
5.2. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sekadau.....61
5.2.1. Produktivitas 68
5.2.2. Kualitas Layanan 74
5.2.3. Responsivitas 81
5.2.4. Responsibilitas 86
5.2.5. Akuntabilitas 92

BAB VI PENUTUP 98
6.1. Kesimpulan 98
6.2. Saran.....101
6.3. Keterbatasan Penelitian.....103

DAFTAR PUSTAKA 105

LAMPIRAN –LAMPIRAN 108

DAFTAR TABEL

Tabel *Halaman*

1.1. SOP Patroli Rutin Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.....3

1.2. Jumlah Titik Hotspot Kabupaten Sekadau 2020 – 2024.....9

2.1. Hasil Penelitian Yang Relevan.....22

3.1. Waktu Penelitian.....32

4.1. Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Sekadau.....41

4.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Sekadau Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 20 42

4.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Sekadau Menurut Kelompok Usia Tahun 2023 42

5.1. Jumlah Titik Hotspot Kabupaten Sekadau 2020 – 2024.....62

5.2. Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Sekadau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026.....63

5.3. Indikator Kinerja Sasaran BPBD Kabupaten Sekadau 2021 – 2026.....65

5.4. Indikator Kinerja Kunci BPBD Kabupaten Sekadau.....67

5.5. Peralatan Kebakaran Milik BPBD Kabupaten Sekadau.....69

5.6. Anggaran Program BPBD Kabupaten Sekadau 2021 – 2026.....71

5.7. Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan Menurut Kecamatan Kabupaten Sekadau 2020 – 2024.....77

5.8. Anggaran Program, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 2021 – 2026.....87

5.9. Laporan Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau.....93

DAFTAR GAMBAR

Gambar *Halaman*

2.1. Kerangka Penelitian 25
4.2. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Sekadau 2024 46
5.1. Pencapaian Kinerja BPBD Kabupaten Sekadau 2016 s/d 2021.....89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *Halaman*

1 Pendoman Wawancara.....108

2 Pendoman Observasi.....119

3 Tabel Identitias Infroman Penelitian.....120

4 Dokumentasi Penelitian 121

5 Surat Tugas Penelitian.....129

6 Daftar Riwayat Hidup 133

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat rawan bencana alam yang besar**.** hal tersebut dilatarbelakangi dengan kekayaan hutan yang dimiliki Indonesia begitu sangat luas, khususnya bencana kebakaran hutan yang awalnya dianggap biasa namun seiring berjalannya waktu kebakaran hutan menjadi sebuah bencana bagi negara Indonesia. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat terhadap bencana di Indonesia. Karena hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Dari kutipan tersebut maka jelas bahwa seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak dasar yang sama tanpa memandang status ekonomi, sosial, serta budaya untuk terbebas dari rasa takut dan ancaman yang bisa saja terjadi. Hak masyarakat untuk merasa aman harus dijamin oleh pemerintah serta mewujudkan tujuan bangsa Indonesia.

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk mewujudkan rasa aman bagi masyarakat sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwasanya pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan yang dimaksud yaitu dapat diartikan juga perlindungan terhadap bencana oleh pemerintah kepada warga negaranya. Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu pra

bencana, saat tanggap darurat, dan pascab encana. Pascabencana dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.

Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 sebagai dasar pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB merupakan badan yang menangani masalah kebencanaan dalam hal pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana untuk menanggulangi bencana di Indonesia. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dimana kewenangan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, maka masing-masing pemerintah daerah harus memulai meningkatkan kemampuannya untuk dapat secara mandiri mengatasi permasalahan bencana di daerahnya masing-masing. Maka dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tinggkat provinsi, kabupaten, dan kota. Tujuan dibentuknya Lembaga ini adalah untuk mengkoordinasikan kerja Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana agar lebih efektif dan memberikan hasil yang nyata.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 9), BPBD Kabupaten Sekadau mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah lainnya dan /atau pihak lainnya yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
2. Melaksanakan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat Daerah lainnya, Instansi Vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
3. Melakukan koordinasi dan integrasi terhadap kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Pegelola administrasi, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan dilingkungan satuan kerjanya;
5. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan dibidang penanggulangan bencana yang diserahkan oleh Bupati.

Berikut adalah poin-poin tugas dan tahapan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Patroli Rutin Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan berdasarkan Peraturan Dirjen PPI Nomor P.12/PPI/SET/KUM.1/12/2020:

Tabel 1.1.

SOP Patroli Rutin Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Tahapan	Kegiatan
Persiapan	a. Menetapkan desa sasaran patroli rutin pencegahan karhutla.
	b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan (waktu, lokasi, personil, logistik, alat, transportasi, dokumen).
	c. Menyiapkan Surat Tugas (ST), peta kerja, blanko pelaporan, dan berkas lainnya.
	d. Merencanakan koordinasi dengan TNI (Babinsa), POLRI (Babinkamtibmas), tokoh masyarakat, dan MPA.
	e. Menyiapkan alat dan bahan.
	f. Petugas patroli dapat berasal dari Manggala Agni, ASN, TNI/POLRI, Brigdalkarhutla, atau MPA.
Pelaksanaan	a. Patroli dilakukan secara harian dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala UPT/Satker pelaksana.
	b. Melakukan koordinasi dengan para pihak.
	c. Melakukan pergerakan sesuai rencana atau disesuaikan dengan kondisi lapangan.
	d. Mencatat data dan informasi di lapangan serta menginventarisasi sumber air.
	e. Melakukan sosialisasi, kampanye, atau penyadartahuan lewat anjangsana atau kunjungan ke rumah-rumah/rute patroli.
	f. Menyebarluaskan informasi SPBK, cuaca, gambut, El-Nino, risiko karhutla, melalui bendera/papan PBK/metode lain.
	g. Jika menemukan api kecil: lakukan size up, pemadaman awal, pencatatan, dan pelaporan. Jika tidak terkendali, laporkan secara berjenjang.
Pelaporan	a. Membuat laporan insidentil (langsung atau tidak langsung) jika diperlukan.

Tahapan	Kegiatan
	b. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan patroli.
	c. Melakukan dokumentasi kegiatan patroli.

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup, 2025

Salah satu wilayah yang sering terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah Provinsi Kalimantan Barat. Seperti yang diketahui bahwa Kalimantan Barat memiliki wilayah yang luas dan wilayahnya masih banyak terdapat hutan dan lahan gambut. Di wilayah Kalimantan Barat terdapat beberapa daerah yang sering sekali mengalami bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, seperti Kabupaten Kubu Raya, Ketapang, Kayong Utara, Melawi, Sambas, Sintang, Sekadau, Sanggau, Kapuas Hulu, Landak, Bengkayang, Singkawang, dan Mempawah. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan munculnya kabut asap yang sangat membahayakan. Kabut asap tersebut tidak hanya berdampak bagi bidang ekonomi, sosial, budaya dan Pendidikan, namun juga berdampak pada Kesehatan masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya.

Terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sekadau disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kebakaran yang disebabkan oleh alam seringkali terjadi akibat beberapa fenomena alam yang memicu terjadinya api di hutan. Meskipun demikian, kebakaran hutan yang diakibatkan oleh faktor alam biasanya tidak menimbulkan dampak yang luas dan kerugiannya cenderung lebih kecil dibandingkan kebakaran hutan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Beberapa faktor alam yang dapat menyebabkan kebakaran hutan antara lain adalah musim kemarau Panjang, yang menyebabkan suhu udara meningkat dan memicu kebakaran di hutan. Sambaran petir juga menjadi salah satu penyebab, terutama

pada perubahan iklim akibat pemanasan global yang meningkatkan frekuensi sambaran petir.

Faktor selanjutnya yaitu kebakaran yang disebabkan oleh kesengajaan manusia, kebakaran yang disebabkan oleh kesengajaan manusia merupakan masalah yang lebih serius dan sering kali menjadipenyebab utama bencana kabut asap di Kabupaten Sekadau setiap tahunnya. Salah satu penyebab utama adalah untuk pembakaran lahan yang tidak terkendali, yang sering dilakukan untuk membuka lahan perkebunan. Ketika pembakaran ini dilakukan dalam skala kecil, dampaknya mungkin masih bisa dikendalikan, tetapi Ketika dilakukan oleh perusahaan besar dalam skala besar, kebakaran ini menjadi sulit dipadamkan dan sanggat berbahaya, terutama jika terjadi di lahan gambut atau rawa.

Faktor ekonomi masyarakat lokal juga turut berkontribusi atas terjadinya kebakaran, di mana pembakaran hutan sering dianggap sebagai cara mudah dan murah untuk membuka lahan baru, meskipun dampaknya sangat berbahayaa bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. sekain itu, kebakaran hutan juga bisa dipivu oleh kelalaian, seperti meninggalkan bekas api unggun atau membuang putung rokok dihutan, yang biasanya dilakukan oleh orang yang beraktivitas di dalam hutan tanpa memperhatikan resiko kebakaran.

Dengan merujuk pada informasi yang diperoleh dari Satu Data Sekadau, Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau data menunjukan bahwa selama periode tahun 2019 hingga 2022, telah tercatat sebanyak 3.303 titik panas (*hotspot*). dari data tersebut dapat diketahui bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2022, yaitu dengan jumlah titik panas mencapai angka tertinggi sebesar 1.997

titik panas. Akibat dari fenomena ini, tidak hanya terjadi lonjakan jumlah titik panas, namun juga terjadi peningkatan dampak yang signifikan, dengan lahan yang terbakar mencapai luas sebesar 121,35 hektar.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sekadau masih belum optimal, sehingga menyebabkan banyaknya lahan yang terbakar. Dalam hal menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sekadau merupakan tugas pemerintah daerah dan semua lapisan masyarakat, namun lebih khusus tugas penanggulangan bencana kebakaran ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau merupakan Lembaga yang memiliki tugas utama dalam hal menanggulangi bencana yang terjadi, termasuk kebakaran hutan dan lahan.

Dalam upaya menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, BPBD Kabupaten Sekadau telah menetapkan skema penanggulangannya, skema ini dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang memiliki titik api cukup tinggi, terutama pada saat musim kemarau Panjang. Tujuannya adalah untuk meminimalisir resiko kebakaran hutan serta memastikan kesiapsiagaan dalam merespons kebakaran yang terjadi. Berikut adalah Langkah-langkah yang diambil dalam skema penanggulangann kebakaran hutan dan lahan oleh BPBD Kabupaten Sekadau :

1. Memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi.
2. Tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan.
3. Tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan.
4. Tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Api unggun harus dipadamkan terlebih dahulu jika ingin meninggalkan hutan.
5. Melakukan patroli hutan secara berkala untuk mengecek kondisi hutan.
6. Melakukan pemotretan citra secara berkala terutama di wilayah dengan titik api yang tinggi.
7. Menyediakan mobil pemadam kebakaran yang siap untuk digunakan.
8. Apabila terjadi kebakaran hutan berskala kecil, maka lakukan penyemprotan secara langsung ke daerah yang terbakar.
9. Jika kebakaran terjadi dalam skala besar, maka lakukan penyemprotan air dari udara menggunakan helikopter juga membuat hujan buatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkerja sama dengan berbagai lintas sektor seperti Polisi, TNI, Pemadam Kebakaran, Tim Reaksi Cepat, Kepala Desa, dan masyarakat dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Sekadau, Kerjasama antara BPBD dengan sektor-sektor terkait dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Sekadau sangat penting untuk menciptakan sinergi yang efektif. Kerjasama ini dimulai dari aspek keamanan hingga pelaksanaan operasional di lapangan. Polisi dan TNI berperan dalam menjaga ketertiban dan memastikan situasi di lapangan aman selama operasi pemadaman. Selain itu, mereka juga memberikan dukungan logistik dan tenaga dalam upaya pemadaman. TNI dan Polri Operasi Gabungan BPBD sering melakukan operasi gabungan dengan TNI dan Polri untuk pemadaman karhutla, terutama di lokasi yang sulit dijangkau. TNI dan Polri juga berperan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Bersama dengan BPBD, TNI dan Polri juga melakukan patroli untuk mencegah terjadinya

pembakaran lahan dan menyosialisasikan bahaya karhutla kepada masyarakat. Pemadam Kebakaran (Damkar) berperan penting dalam respons cepat terhadap kebakaran, bekerja sama dengan BPBD untuk mengerahkan peralatan dan sumber daya yang diperlukan.

Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibentuk oleh BPBD memiliki peran penting dalam upaya tanggap darurat dengan memantau situasi dan melaporkan titik api kepada posko. TRC bertindak sebagai penghubung langsung di lapangan untuk mengkoordinasikan upaya pemadaman awal. Dalam hal pencegahan dan edukasi, BPBD bekerja sama dengan Kepala Desa untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan serta langkah-langkah pencegahannya. Kepala desa juga berfungsi sebagai pengorganisir masyarakat lokal, memastikan mereka terlibat aktif dalam upaya pemadaman atau evakuasi jika diperlukan.

Partisipasi masyarakat sangat krusial dalam penanggulangan karhutla. BPBD memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai cara penanganan awal kebakaran, serta membangun kesadaran agar mereka melaporkan kebakaran secara cepat dan tepat. Masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan mitigasi seperti patroli bersama dan pembuatan sekat bakar. Semua sektor ini berkoordinasi melalui posko bersama yang didirikan oleh BPBD untuk memastikan setiap langkah yang diambil terorganisir dengan baik. Dengan sinergi ini, diharapkan tindakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sekadau bisa dilakukan secara lebih efektif dan tepat waktu, serta mengurangi dampak kerusakan yang ditimbulkan.

Kebakaran hutan dan lahan hampir sering terjadi di Kabupaten Sekadau saat musim kemarau. Hal ini disebabkan karena Wilayah Kabupaten Sekadau memiliki ciri daratan dan perbukitan semak belukar yang cukup luas. Tingkat ketinggian daratan apabila diukur dibawah permukaan laut (DPL) berada pada kisaran 0 meter DPL sampai dengan 1000 meter DPL. Pada umumnya keadaan topografi Kabupaten Sekadau merupakan wilayah dengan keadaan kelas lereng yaitu sebesar 107.260 hektar. Sedangkan kelas lereng yang melebihi yaitu sebesar 32.320 hektar. Ciri kontur wilayah Kabupaten Sekadau yang terdapat banyak lereng dan semak belukar tersebut memang rentan terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, maraknya pembukaan lahan pertanian maupun perkebunan dengan cara membakar lahan juga menjadi salah satu sebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sekadau kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sekadau dari rentan tahun 2019 sampai tahun 2023 paling parah terjadi pada tahun 2022 yaitu terdapat 829 titik panas (*hotspot*) dengan 167 kasus kebakaran hutan dan lahan. Namun titik panas terbanyak yaitu terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah 1.997 titik api. Untuk mengetahui jumlah titik api di Kabupaten Sekadau dari tahun 2019 sampai tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1.2.
Jumlah Titik Hotspot Kabupaten Sekadau
Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Jumlah (Titik Hotspot)
1	2020	1427
2	2021	1379
3	2022	1027
4	2023	2366
5	2024	1964

Sumber : Kantor BPBD Kabupaten Sekadau 2024

Berdasarkan tabel 1.2. jumlah titik hotspot kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sekadau menunjukkan fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada 2020 tercatat 1.427 titik hotspot, sedikit menurun pada 2021 menjadi 1.379 titik. Pada 2022, terjadi penurunan signifikan menjadi 1.027 titik. Namun, pada 2023 angka hotspot meningkat tajam menjadi 2.366 titik, dan sedikit menurun pada 2024 menjadi 1.964 titik. Data ini mengindikasikan bahwa program dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan belum optimal, mengingat fluktuasi angka hotspot yang masih cukup tinggi. Hal ini menjadi masalah bagi masyarakat yang menginginkan lingkungan aman dan bebas dari kebakaran.

Kabupaten Sekadau merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Barat yang rawan terhadap berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, serta kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Data BNPB menunjukkan bahwa wilayah ini berada pada tingkat kerentanan bencana menengah. Dampak dari bencana tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan yang tinggal di daerah rawan. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana.

Salah satu strategi yang dikembangkan pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Desa Tangguh Bencana (Destana) adalah bentuk nyata

pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat yang bertujuan menciptakan desa mandiri dan tangguh dalam menghadapi ancaman bencana. Program ini melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi upaya pengurangan risiko bencana. Melalui pembentukan kelembagaan desa, peraturan, rencana aksi, pelatihan, serta dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, Destana memperkuat kapasitas lokal dalam menghadapi dan memulihkan diri dari bencana. Dengan dukungan peraturan perundang-undangan, Destana juga menjadi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Program Destana bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat desa dalam menghadapi ancaman bencana melalui pelatihan, pembentukan relawan, dan kolaborasi lintas sektor. Pada tahun 2024, Desa Mungguk ditetapkan sebagai Destana ketiga di Kabupaten Sekadau, setelah Desa Nanga Mahap dan Desa Nanga Taman pada tahun 2017. Desa Mungguk ditetapkan menjadi Destana agar upaya ini tidak hanya untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat secara mandiri, tetapi juga sejalan dengan visi BPBD Kabupaten Sekadau, yaitu "Ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana."

Berdasarkan data dari Pemerintah Daerah dan laporan lapangan, desa Mungguk tercatat pernah mengalami beberapa kali kejadian kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa tahun terakhir. Desa Mungguk memiliki keterlibatan masyarakat lokal yang cukup aktif dalam penanggulangan bencana, baik melalui Masyarakat Peduli Api (MPA) maupun kerja sama dengan BPBD. Hal ini memberikan sudut pandang tambahan untuk mengevaluasi efektivitas sinergi antara

BPBD dan warga.Hal ini menjadikan desa Mungguk sebagai lokasi penting untuk mengevaluasi penenangganan dan pencegahan karhutla oleh BPBD

Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi memberikan banyak dampak yang merugikan bagi masyarakat Kabupaten sekadau serta daerah sekitarnya. Dampak tersebut berupa adanya kabut asap yang berbahaya bagi Kesehatan dan menghambat aktivitas masyarakat dan dampak ini berlangsung setiap tahunnya di musim kemarau. Mengingat dampak buruk dari kebakaran hutan dan lahan penulis sanggat tertarik untuk meneliti tentang bagaimana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sekadau.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih banyaknya jumlah bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sekadau.
2. Terhambatnya proses pemadaman api, sehingga pemadaman lahan yang terbakar kurang maksimal.
3. Belum terciptanya Kerjasama antara masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sekadau.

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini difokuskan pada “Produktivitas Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau".

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di kabupaten sekadau?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di kabupaten sekadau.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan dan penetahuan khususnya terkait dengan kinerja pemerintahan organisasi, serta dapat memberikan rekomendasi bagi para pembaca untuk melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja pemerintahan organisasi.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

   Memberikan masukan yang konstruktif untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau dalam menggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sekadau.

2. Lintas sektor terkait penanggulangan karhutla

   Temuan penelitian ini dapat memfasilitasi kerja sama yang lebih kuat antara BPBD dengan sektor lain seperti, TNI, Polri, Tim Reaksi Cepat, serta Kepala Desa dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

3. Masyarakat

   Agar masyarakat mengetahui mengenai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sekadau.

4. Peneliti lain

   memberikan referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai kinerja organisasi pemerintahan serta melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja pemerintahan organisasi.